



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tagihan TGR, Dinas PUPR Minta Bantuan Kejari

KOTA MANNA - OPD mendapati kelebihan bayar kepada pihak kontraktor, diminta untuk menuntaskan kelebihan bayar setelah 60 hari pasca keluarnya LHP BPK, bahkan untuk memperlancar pembayaran TGR, dinas PUPR langsung berinisiatif untuk menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan (BS) agar bisa memback-up proses penagihan kepada pihak ketiga.

Setelah gagal mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemkab BS mendorong agar OPD yang mendapatkan temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI beberapa waktu lalu, segera menuntaskan perkara kelebihan bayar kepada pihak kontraktor maupun pihak ketiga yang mengerjakan proyek fisik maupun pengadaan barang dan jasa, sebab, akibat temuan kelebihan bayar ini menjadi penyebab gagalnya Pemkab BS meraih opini WTP dari BPK RI.

Untuk itu, pemerintah daerah mendorong agar perkara kelebihan bayar ataupun TGR di dinas PUPR, dinas kesehatan dan BPBD untuk segera dituntaskan, karena, tahun ini pemerintah menargetkan seluruh TGR yang masih belum terselesaikan untuk dituntaskan 100 persen.

Dengan adanya desakan dari pemerintah daerah khususnya bupati, dinas PUPR

yang mendapatkan temuan sebesar Rp 1 miliar, langsung tancap gas dengan menggandeng Kejari BS, untuk proses penagihan kepada rekanan ataupun kontraktor yang menerima kelebihan bayar dari pekerjaan fisik maupun pengadaan barang dan jasa.

Kadis PUPR BS Nuzmanto saat dikonfirmasi membenarkan, tidak ada alasan bagi para rekanan untuk malas melunasi kewajibannya berupa pembayaran TGR, apalagi untuk data perusahaan yang belum melunasi TGR, saat ini sudah diserahkan kepada Kejari BS. "Sudah, kita sudah minta bantuan pada Kejari BS," kata Nuzmanto.

Sementara itu, Bupati BS Gusnan Mulyadi mengatakan, apapun upaya yang dilakukan untuk melunasi TGR, diserahkan kepada OPD yang memiliki temuan, termasuk menggandeng APH untuk melakukan penagihan kepada kontraktor. Karena pada pada tahun ini Kabupaten BS harus meraih opini WTP, sebab Kabupaten BS menjadi satu-satunya daerah yang tak pernah meraih status WTP sejak sepuluh tahun terakhir, dan salah satu penyebabnya karena TGR yang belum lunas.

"Target BS WTP, apabila pejabat tidak mendukung apapun resikonya yang kita ambil kita berikan sanksi," ujar Bupati belum lama ini. **(tek)**